

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

##### A.1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.<sup>10</sup>

Kriminologi ditujukan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana kepada hubungan perbuatan dan akibat (hukum sebab akibat). faktor motif dapat ditelusuri dengan bukti-bukti yang memperkuat adanya niat melakukan kejahatan.<sup>11</sup>

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Seorang antropolog yang berasal dari Prancis, bernama Paul Topinard mengemukakan bahwa “Kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasar etimologinya berasal dari dua kata, *crimen*

---

<sup>10</sup> Indah Sri Utari. 2012. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta. Thafa Media. hlm. 20

<sup>11</sup> Romli Atmasasmita. 2007. *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung. PT Refika Aditama. hlm. 5

yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga secara sederhana kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.<sup>12</sup>

Kriminologi merupakan sarana ilmiah bagi studi kejahatan dan penjahat (*crime and criminal*). Dalam wujud ilmu pengetahuan, kriminologi merupakan “*the body of knowledge*” yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan hasil penelitian dari berbagai disiplin, sehingga aspek pendekatan terhadap obyek studinya luas sekali, dan secara inter-disipliner dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta dalam pengertian yang luas mencakup pula kontribusi dari ilmu eksakta. Kriminologi dengan cakupan kajiannya: a. orang yang melakukan kejahatan, b. penyebab melakukan kejahatan, c. mencegah tindak kejahatan, d. cara-cara menyembuhkan orang yang telah melakukan kejahatan.<sup>13</sup>

Bonger memberika definisi kriminologi: ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya. Sedangkan menurut sutherland Kriminologi “*a body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*” (tubuh pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial). Termasuk kedalam lingkup pembahasan kriminologi adalah proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran undang-undang.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011. *Kriminologi*. Jakarta. PT Rajawali press. hlm. 9

<sup>13</sup> Abintoro Prakoso. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta. Laksbang Grafika. hlm. 14

<sup>14</sup> Ibid. Romli Atmasasmita. hlm. 19

Melalui definisi ini, Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

a. Antropologi kriminal

ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat suatu bagian dari ilmu alam.

b. Sosiologi kriminal

ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, jadi pokoknya tentang sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi sosial) dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan *Psychology*.

c. Psikologi kriminal

Ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari sudut ilmu jiwa, penyelidikan mengenai jiwa dari penjahat, dapat ditujukan semata-mata pada kepribadian perseorangan (umpama, bila dibutuhkan untuk memberi penerangan pada hakim, tapi dapat juga untuk menyusun tipologi/golongan penjahat, penyelidikan mengenai gejala-gejala yang nampak pada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok, sebagian juga termasuk dalam psikologi kriminal di mana penyelidikan psikologi kriminal/sosial mengenai repercussis yang disebabkan oleh perbuatan tersebut dalam pergaulan hidup yang tak boleh dilupakan, akhirnya ilmu jiwa dari orang-orang lain di pengadilan sebagai saksi, pembela dan lain-lain serta tentang pengakuan seseorang.

d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dihindangi sakit jiwa atau sakit urat syaraf.

e. Penologi

Ilmu pengetahuan tentang timbul dan tumbuhnya hukuman serta arti dan faedahnya.

f. Kriminalistik

Ilmu pengetahuan untuk dilaksanakan yang menyelidiki teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan yang merupakan gabungan ilmu jiwa tentang kejahatan, dan penjahat, ilmu kimia, pengetahuan tentang barang-barang, geologi dan lain-lain.

Disamping itu terdapat kriminologi terapan yang berupa:

a. Higiene Kriminil

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

b. Politik Kriminil

Usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuan sanksi.

c. Kriminalistik (*policie scientifique*)

Merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.<sup>15</sup>

Menurut M. P. Vrij, mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, mula-mula mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat dari kejahatan tersebut.<sup>16</sup>

J. Constant, menyatakan kriminologi adalah pengetahuan empiris (berdasarkan pengalaman), bertujuan menentukan faktor penyebab terjadinya kejahatan dan penjahat, dengan memperhatikan faktor-faktor sosiologis, ekonomi dan individual.<sup>17</sup>

E. Durkheim, seorang pakar sosiologi masyarakat, kejahatan bukan saja normal, dalam arti tidak ada masyarakat tanpa kejahatan.<sup>18</sup>

Menurut Noach, merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu. Sedangkan Menurut Wolfrang Savitz dan Johnston, mengemukakan bahwa, kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 10

<sup>16</sup> Ibid. Indah Sri Utari. hlm. 3

<sup>17</sup> Kartini kartono. 2014. *Patologi Sosial*. Jilid I. Jakarta. Rajawali jilid I. hlm. 140

<sup>18</sup> H.R Abdussalam. 2007. *Kriminologi*. Jakarta. Restu Agung. hlm. 4

<sup>19</sup> Ibid. Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. hlm. 12

Menurut Wood, kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat. Jadi, kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan baik itu timbul karena pelaku itu sendiri berjiwa penjahat atau lingkungan sekitarnya.<sup>20</sup>

## **A.2. Ruang Lingkup Kriminologi**

Menurut A.S. Alam ruang lingkup pembahasan Kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu:

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).  
Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making law*) meliputi:
  - b. Definisi kejahatan
  - c. Unsur-unsur kejahatan
  - d. Relativitas pengertian kejahatan
  - e. Penggolongan kejahatan
  - f. Statistik kejahatan.
2. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), sedangkan yang dibahas dalam Etiologi Kriminal (*breaking of laws*) meliputi:
  - a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
  - b. Teori-teori kriminologi

---

<sup>20</sup> Wahyu Muljono. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi* Yogyakarta. Pustaka Yustisia. hlm. 34

c. Berbagai perspektif kriminologi

1. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*).

Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking laws*) meliputi:

- a. Teori-teori penghukuman
- b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan pre-emptif, preventif represif, dan rehabilitatif.<sup>21</sup>

Menurut Sutherland, kriminologi dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama, yaitu:

- a. Etiologi kriminal, yaitu mencari secara analitis ilmiah sebab-sebab dari pada kejahatan.
- b. Penology, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya, berkembangnya hukuman, arti dan faedahnya.
- c. Sosiologi hukum, yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.<sup>22</sup>

Objek studi kriminologi adalah:

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan
- b. Pelaku kejahatan dan

<sup>21</sup> A. S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar. Refleksi. hlm. 2-3

<sup>22</sup> Ibid. Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. hlm. 10

- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.<sup>23</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Judi**

### **B.1. Pengertian Judi**

Dalam Ensiklopedia Indonesia Judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya.<sup>24</sup>

Sedangkan Dra. Kartini Kartono mengartikan judi adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3) mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Termasuk juga main judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.

---

<sup>23</sup> Ibid. Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. hlm. 12

<sup>24</sup> Arhiefstyle87, Sosial dan Politik, <https://arhiefstyle87.wordpress.com/2008/04/10/>, diakses tanggal 7 Oktober 2017



Dan lain-lainnya pada Pasal 303 ayat (3) diatas secara detil dijelaskan dalam penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Antara lain adalah rolet, poker, hwa-hwe, nalo, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda dan karapan sapi.

Dari pengertian diatas maka ada tiga unsur agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai judi. Yaitu adanya unsur :

- Permainan/perlombaan Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif. Namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.
- Untung-untungan. Artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan. Atau factor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.
- Ada taruhan. Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Bahkan kadang istripun bisa dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk

menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.

Dari uraian di atas maka jelas bahwa segala perbuatan yang memenuhi ketiga unsur diatas, meskipun tidak disebut dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 adalah masuk kategori judi meskipun dibungkus dengan nama-nama yang indah sehingga nampak seperti sumbangan, semisal PORKAS atau SDSB. Bahkan sepakbola, pingpong, bulutangkis, voley dan catur bisa masuk kategori judi, bila dalam prakteknya memenuhi ketiga unsur diatas.

## **B.2. Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Judi**

### **1. Faktor Kebiasaan**

Faktor kebiasaan, ada juga anggota masyarakat yang melakukan perjudian sabung ayam karena kesenangan atau kegemarannya akan perjudian serta keinginan untuk menghilangkan rasa bosan. Meskipun keadaan mereka secara ekonomis cukup baik dan bahkan seringkali sudah dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik, tetap saja mereka melakukan perjudian karena kegemarannya untuk melakukan perjudian.

### **2. Faktor Lemahnya Pengimplementasian Ajaran Agama**

Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, hampir seluruh wilayah Indonesia bagi para pemeluk agama, sering terkikis dan tererosi. Penalaran dan pengalaman terhadap nilai-nilai agama yang luntur, sering kali pemeluk agama melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Kaitan dengan kegiatan merugikan orang lain banyak perbuatan-perbuatan yang

mengandung unsur mendorong, menyuruh, memberikan peluang dan kesempatan memerintahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain.

### 3. Faktor Lingkungan

Faktor yang tidak kalah berpengaruhnya dalam menciptakan mental yang selalu ingin berbuat jahat adalah pergaulan atau faktor lingkungan. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu ingin hidup berkelompok, hal tersebut sejalan dengan apa yang pernah dikatakan oleh Aristoteles dalam sebuah istilah yang disebut " Zoon Politikon ", yang artinya manusia adalah Makhluk Sosial yang hanya menyukai hidup bergolongan atau sedikitnya mencari teman untuk hidup bersama.

### 4. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor yang sangat penting dan bahkan sering dijadikan alasan bagi pelaku tindak kejahatan untuk melakukan suatu tindak kejahatan, adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi sangat mempengaruhi terjadinya keinginan untuk melakukan perjudian, dengan membayangkan keuntungan yang lebih besar. Pada era globalisasi ini, nilai kebendaan nampak lebih menonjol dari nilai budi, norma, dan akhlak. Yang sering menjadi masalah di masyarakat global saat ini adalah di mana kebutuhan semakin meningkat sementara kemampuan untuk memenuhi kebutuhan itu tidak mencukupi. Ketidakseimbangan inilah yang sering memicu seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara apapun, termasuk melakukan dengan cara-cara yang melawan hukum, yang salah satunya adalah perjudian sabung ayam.

## 5. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Dalam hal meningkatnya kejahatan perjudian tidak terlepas dari lemahnya penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menjadi pelaku kejahatan perjudian ataupun oknum-oknum yang sengaja mengorganisir kejahatan perjudian tersebut.<sup>25</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Sabung Ayam

#### C.1. Definisi Sabung Ayam

Sabung Ayam adalah permainan antara 2 ayam (ayam jago) dalam satu area, kedua ayam tersebut di adu hingga salah satu dari ayam tersebut kalah bahkan hingga mati. Penyakit masyarakat terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam ini sangat merugikan masyarakat sekitar dan bangsa Indonesia ini. Bagaimana tidak, perjudian membuat masyarakat menjadi pemalas untuk bekerja dengan keras dalam mendapatkan nafkah. Mereka hanya mengandalkan peruntungan dari kegiatan perjudian tersebut. Selain itu tindak pidana ini juga berpengaruh terhadap kalangan anak-anak, mereka akan ikut-ikutan melakukan tindak pidana perjudian tersebut karena kegiatan tersebut sering mereka lihat dalam lingkungan mereka dan menjadi hal yang biasa. Adapun beberapa masalah yang timbul akibat perjudian ini adalah bahwa beberapa orang akan menjadi ketagihan, mereka tidak dapat berhenti berjudi dan akhirnya kehilangan banyak uang. Selain itu, judi membuat orang akan menjadi pemalas,

---

<sup>25</sup> Ikbal. 2013. *Tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana judi sabung ayam di kabupaten kolaka*. Makassar. Bagian hukum pidana fakultas hukum universitas hasanuddin makassar. Hal 61-66

mereka akan menjadi malas untuk bekerja dalam mencari nafkah. Judi akan mereka jadikan sebagai peruntungan dalam mendapatkan uang.<sup>26</sup>

## **C.2. Penanggulangan Terhadap Perjudian Sabung Ayam**

Teori penanggulangan kejahatan, khususnya perjudian sabung ayam perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, yaitu adanya keterpaduan (*integritas*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan "penal" dan "nonpenal".

1. Upaya Penal dalam Penanggulangan Perjudian Sabungan Ayam Jalur Penal terdiri atas beberapa tahap, yaitu:
  - a. Tahap formulasi (kebijakan legislatif)
  - b. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial), dan
  - c. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Ada dua hal penting dalam upaya penal ini yang harus dilakukan yaitu pembaharuan hukum pidana melalui tahap formulasi dan penegakan hukum pidana melalui tahap aplikasi.

- a. Tahap Formulasi

Asas legalitas sebagaimana tersurat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi". Ini artinya suatu perbuatan hanya boleh dihukum apabila secara jelas telah dikatakan dalam suatu perundang-

---

<sup>26</sup> Meiana Wahyu Retno Mutia. 2017. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Dalam Masyarakat Di Wilayah Hukum Kabupaten Magetan*. Surakarta. program studi ilmu hukum fakultas hukum universitas muhammadiyah surakarta. Hal 2-3.

undangan bahwa perbuatan itu adalah melanggar hukum dan dapat dipidana (merupakan tindak pidana).

b. Tahap Aplikasi

Tahap Aplikasi yaitu penerapan hukum pidana (*criminal law application*) khususnya yang dilakukan oleh kepolisian. Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui tahap kebijakan aplikatif (penerapan hukum pidana *in concreto*) harus juga memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa *social welfare* dan *social defence*. Penegakan hukum pidana yang dimaksud adalah penanggulangan kejahatan dengan memakai hukum pidana.

2. Upaya Non-Penal dalam Penanggulangan Perjudian Sabungan Ayam  
Upaya non penal ini perlu dilakukan untuk mendukung dan membantu upaya penal dalam penanggulangan kejahatan, hal ini dikarenakan upaya penal saja ternyata tidak bisa terlalu efektif dalam penanggulangan kejahatan, khususnya yang menyangkut perjudian sabungan ayam.

1. Peningkatan kesejahteraan dan mengurangi pengangguran.

Masalah kesejahteraan masyarakat dewasa ini menjadi suatu masalah yang sangat pelik untuk diselesaikan. Tolak ukur yang menandakan apakah masyarakat sejahtera atau berada di bawah garis kemiskinan pun sulit untuk ditentukan secara jelas oleh pemerintah.

2. Peningkatan pendidikan dan pemahaman agama yang baik

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara dan untuk itu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai

dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan gender

### 3. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat

Kepatuhan hukum pada hakikatnya menyangkut tentang kesetiaan seseorang atau subjek hukum terhadap hukum itu, yang diwujudkan dalam bentuk perilaku nyata.

### 4. Memberikan penyuluhan-penyuluhan agama kepada masyarakat

Sehingga pemahaman agama dari masyarakat tidak dangkal, dan bisa membuat masyarakat sadar bahwa perjudian sabung ayam haram hukumnya.<sup>27</sup>

## **D. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian**

### **D.1. Pengertian Polisi**

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaris, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari Abri. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari beberapa sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.

Dengan demikian berbicara kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian. Pemberian makna dari kepolisian ini dipengaruhi dari

---

<sup>27</sup> I Nyoman Gede Remaja1, *Penanggulangan Perjudian Sabungan Ayam Melalui Pendekatan Kebijakan Kriminal*, <https://Jurnalwidyatech.Files.Wordpress.Com/2012/02/I-Nyoman-Gede-Remaja.Pdf>, Di Akses Tanggal 1 November 2017

konsep fungsi kepolisian yang yang diembannya dan dirumuskan dalam tugas dan wewenangnya.

Kepolisian republic Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan juga pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Tujuannya untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan pengayom dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Fungsi-dan peran kepolisian dari masa-kemasa selalu menjadi bahan perbincangan, mulai dari praktisi hukum maupun akademis, bahkan masyarakat kebanyakan pada berusaha memposisikan secara positif kedudukan, fungsi dan peran kepolisian.<sup>28</sup>

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 terdapat rumusan mengenai definisi berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selengkapnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 berbunyi :

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

---

<sup>28</sup> Warsiti Adi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Jakarta, prestasi pustaka, Hal. 3



1. Kepolisian adalah segala hal yang ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang- Undang memiliki wewenang umum kepolisian.
4. Peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
6. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya

hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.
8. Penyelidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.
9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
10. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang- Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
12. Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang.

13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

## **D.2. Fungsi dan Peranan Polisi**

fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>29</sup> Polisi adalah hukum yang hidup. Melalui polisi janji-janji dan tujuan-tujuan hukum untuk mengamankan serta melindungi masyarakat menjadi kenyataan. Perincian tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, misalnya membuktikan hal tersebut, diantaranya yaitu :

1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
2. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
3. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam.
4. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.

---

<sup>29</sup> Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, USU press, Medan, 2009, halaman 40

5. Mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan peraturan Negara.

Fungsi kepolisian salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian (POLRI) terkait erat dengan *Good Governance*, yakni sebagai alat Negara yang menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secara atributif melalui ketentuan Undang-undang (pasal 30 UUD 1945 dan pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI.)<sup>30</sup>

### **D.3. Wewenang Polisi**

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur di dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri yang berbunyi :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

---

<sup>30</sup> Undang-undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. Dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.